

## BAB IV PENUTUP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat hampir tercapai seluruhnya sesuai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 serta target jangka menengah, dengan rincian sebagai berikut:

### A. Capaian Kinerja

#### 1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016

Dari 13 indikator kinerja Inspektorat, 2 indikator kinerja belum bisa diketahui capaiannya, 2 indikator kinerja capaiannya baik sekali, 8 indikator kinerja capaiannya baik, dan 2 indikator yang capaiannya cukup dan kurang. Dua capaian indikator kinerja tersebut adalah: a) Persentase OPD yang melaksanakan SPIP dan b) Persentase penyelesaian TLHP kasus pengaduan masyarakat. Penyebab utama tidak tercapainya indikator kinerja tersebut adalah terbatasnya SDM fungsional pengawasan, sementara beban kerja Inspektorat semakin meningkat dengan munculnya peraturan-peraturan yang baru. Hal tersebut mengakibatkan kegiatan terkait pencapaian indikator kinerja tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Penyebab yang lain adalah Tim Satuan Tugas yang dibentuk untuk suatu kegiatan tidak dapat berfungsi dengan baik dikarenakan kurangnya komitmen personil yang ditunjuk dan surat keputusan penugasan yang sudah terlalu lama dan dilupakan.

#### 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015

Secara umum perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2016 dan 2015 tidak terlalu berbeda jauh. Untuk pencapaian target akumulasi, trend grafiknya meningkat meskipun ada yang menurun tetapi tidak terlalu signifikan. Pencapaian yang sangat membanggakan pada tahun 2016 adalah: a) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat oleh KemenPAN RB dikategorikan A; dan b) Inspektorat Provinsi Jawa Barat menjadi APIP Provinsi pertama yang level kapabilitasnya adalah level 3 berdasar *assessment* dari BPKP.

Sementara pencapaian yang statis tidak berubah dari tahun sebelumnya, sementara target ditetapkan meningkat adalah “Persentase PD yang melaksanakan SPIP”, yang masih tetap dalam poin 47%.

#### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Renstra

Dari 13 indikator kinerja, secara umum (12 indikator kinerja) Inspektorat optimis bisa mencapai target tersebut di akhir tahun Renstra (tahun 2018), dan hanya ada 1 (satu) indikator yang pesimis bisa dicapai pada akhir tahun Renstra, indikator kinerja tersebut adalah “Persentase PD yang melaksanakan SPIP”, yang menargetkan seluruh PD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan SPIP (100%).

B. Realisasi Anggaran

Capaian indikator kinerja tahun 2015 tersebut didukung dengan anggaran yang bersumber dari DPA 1.20.06 Inspektorat Anggaran tersebut dituangkan dalam 8 (delapan Program) dan 14 Kegiatan.

Tabel 4.1  
Realisasi Anggaran Tahun 2016

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran
			Keuangan (Rp)	%	
1	3	4	5	6	7
1	Belanja Tidak Langsung /Gaji/Tunjangan	17.803.394.426,00	17.655.134.167,00	98,64	110.183.170,00
2	Belanja Langsung	25.897.885.000,00	25.544.578.821,00	99,17	353.306.179,00
A. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan :					
1.	Pelaksana Pemeriksaan dan Evaluasi pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.	15.461.601.000,00	15.454.812.500,00	99,96	6.788.500,00
2.	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat.	718.984.400,00	713.207.216,00	99,20	5.777.184,00
3.	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Kebijakan Pengawasan dan Rencana Kerja Pengawasan.	600.000.000,00	592.875.000,00	98,81	7.125.000,00
4.	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen Kementerian Dalam Negeri, Itjen Kementerian Lainnya dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat.	872.068.000,00	758.880.642,00	87,02	113.187.358,00
5.	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Pemerintah Kabupaten/Kota.	800.000.000,00	783.162.061,00	97,90	16.837.939,00
6.	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan	589.086.000,00	586.865.000,00	99,62	2.221.000,00
B. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah, yang meliputi pelaksanaan kegiatan :					
7.	Desk Akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Jawa Barat	90.000.000,00	76.952.609,00	85,50	13.047.391,00
C. Program Pengembangan Kopetensi Aparatur yang meliputi pelaksanaan Kegiatan :					
8.	Peningkatan Kualitas SDM Aparat Pengawasan.	378.293.000,00	367.998.766,00	97,28	10.294.234,00
9.	Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Barat	618.000.000,00	563.146.800,00	91,12	54.853.200,00
D. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi pelaksanaan kegiatan :					



10.	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Inspektorat Provinsi Jawa Barat.	2.487.260.000,00	2.446.225.071,00	98,35	41.034.929,00
E. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi pelaksanaan kegiatan:					
11.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	873.900.000,00	861.139.400,00	98,54	12.760.600,00
F. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi kegiatan :					
12.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Barat.	2.255.667.000,00	2.189.585.536,00	97,07	66.081.464,00
G. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah meliputi kegiatan :					
13.	Pengelolaan Keuangan Inspektorat Provinsi Jawa Barat	99.025.000,00	96.505.920,00	97,46	2.519.080,00
H. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan meliputi kegiatan :					
14.	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal	54.000.000,00	53.222.300,00	98,56	777.700,00
JUMLAH		43.701.279.426,00	43.199.712.988,00	98,85	501.566.438,00

Pada tahun 2016, Inspektorat mendapat apresiasi positif dari Gubernur karena menjadi PD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang persentase penyerapan anggarannya paling tinggi. Meskipun hal tersebut bukan menjadi dasar penilaian kinerja yang baik, akan tetapi mengindikasikan bahwa Inspektorat telah mampu manajemen keuangannya dengan baik.

C. Langkah-Langkah untuk Peningkatan Kinerja Tahun 2017

Langkah dan upaya yang dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerja tahun 2017 adalah:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tematik dan berbasis risiko dengan lebih meningkatkan aspek kehati-hatian terhadap distribusi SDM dan anggaran, sehingga dengan SDM dan anggaran yang terbatas, semua tujuan dan sasaran Inspektorat bisa dicapai pada akhir tahun;
2. Menata kembali implementasi SPIP baik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun internal Inspektorat. Memperbaharui SK Tim Satgas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Inspektorat, mensosialisasikan kembali pelaksanaan SPIP, serta melakukan *mapping* pelaksanaan SPIP pada setiap PD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Terkait dengan beberapa beban kinerja baru, perlu adanya konsolidasi ulang pembagian tugas kerja di internal struktur organisasi Inspektorat;
4. Mengirimkan aparat fungsional pengawasan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional yang lebih *advance*, misal: sertifikasi gelar QIA, CfrA, CPMA, dll.